



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN  
PANGANDARAN**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2023**





**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Raya Parigi No. \_\_ Tlp/Fax (0265) 2641089 Kode Pos 46393  
e-mail : setwanpangandaran@gmail.com  
website : dprd.pangandarankab.go.id

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 188.4/Kpts. /SETWAN/2022

TENTANG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2023

**SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48).

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,



**YAYAT KISWAYAT**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;  
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran;  
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 188.4/Kpts. /SETWAN/2022  
TANGGAL : 29 Juli 2022

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2023

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
  - 1. Sekretariat DPRD
- B. Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
  - I. Pendahuluan
    - 1.1 Latar Belakang
    - 1.2 Landasan Hukum
    - 1.3 Maksud dan Tujuan
    - 1.4 Sistematika Penulisan
  - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
    - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
    - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
    - 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
    - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
    - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
    - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
    - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
    - 3.3. Program dan Kegiatan
  - IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - V. Penutup
- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,



**YAYAT KISWAYAT**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam penentuan program dan kegiatan pada tahun 2023. Didalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021–2026.

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Parigi, 29 Juli 2022  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN

**Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19631222 198608 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU .....	6
2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU .....	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	30
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	32
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD .....	53
3.3 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	53
3.4 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD .....	54
3.5 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	68
BAB V PENUTUP.....	82



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Pangandaran 2021-2026.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.



3. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Maka dari itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.



### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan.
2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat DPRD yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban dari tugas-tugas kepada Bupati.
4. Merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program satu tahun.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah:

1. Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat DPRD;
2. Memberikan Kontribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan;
3. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023; dan
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



## 1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun berjalan.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.



#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap Perangkat Daerah.

#### 2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan berdasarkan sumber dana APBD.

### BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan kaidah pelaksanaan sesuai dengan Renja Perubahan Perangkat Daerah, penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD, serta penegasan Renja Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah pada tahun 2023.

### BAB V PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2021 - 2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat DPRD dan atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Sekretariat DPRD tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022, pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

#### **2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran 2021 - 2026 adalah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan dewan dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD secara detail dapat dilihat dalam form berikut (TC-29):



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra  
Sekretariat DPRD s/d Tahun 2022 Kab. Pangandaran

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasia Pemerintahan																
Sekretariat DPRD																
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, peningkatan kompetensi aparatur, perencanaan dan evaluasi yang berkualitas, sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	90	181.215.623.051,01	85%	3.531.980.150	90	26.652.534.098,00	89	23.629.366.938,00	90	29.350.882.778,00				
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja, dokumen penganggaran kinerja, dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90	422.922.863,23			100	48.060.500,00	75	35.826.750,00	90	49.990.000,00	164	67.626.750,00	182,54	15,99



1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	335.886.582,06			8	43.410.500,00	8	35.826.750,00	8	43.400.000,00	13	67.626.750,00	32,50	20,13
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	5.101.005,01							1	875.000,00	1	0,00	20,00	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	5.101.005,01							1	875.000,00	1	0,00	20,00	0,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	22.444.422,04							1	1.925.000,00	1	0,00	20,00	0,00
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	22.444.422,04							1	1.925.000,00	1	0,00	20,00	0,00
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	26.844.422,04			6	4.650.000,00	5	-	1	265.000,00	6	0,00	120,00	0,00



	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
1.8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5.101.005,01						1	725.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.9	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik</b>	90	27.122.961.623,53			<b>100</b>	<b>3.163.396.883,00</b>	<b>89</b>	<b>2.807.124.800,00</b>	<b>90</b>	<b>3.722.599.878,00</b>	170	5.476.340.151,00	188,36	20,19
1.10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25.786.147.590,23			25	3.069.841.883,00	24	2.750.660.700,00	30	3.678.649.878,00	49	5.388.076.051,00	196,00	20,90
1.11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
1.12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	397.412.301,99			12	45.670.000,00	12	36.699.100,00	12	42.250.000,00	21	68.499.100,00	35,00	17,24



	SKPD																
1.13	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
1.14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	924.368.917,28			1	47.885.000,00	1	19.765.000,00	1	500.000,00	2	19.765.000,00	40,00	2,14	
1.15	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	2.550.502,51							1	250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70	8.401.507,52			2	-	2	-	14	500.000,00	12	0,00	17,14	0,00	
1.17	Bulanan/Triwulanan/S																



	emesteran SKPD																			
1.18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	4.080.804,01							2	450.000,00	1	0,00	10,00	0,00				
1.19	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik</b>	<b>90</b>	<b>463.418.084,24</b>							<b>90</b>	<b>61.990.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.800.650,00</b>	<b>90</b>	<b>69.840.000,00</b>	100	94.871.460,00	111,11	20,47
1.20	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	4.335.854,26							2	225.000,00	2	0,00	20,00	0,00				
1.21	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	77.739.316,35							2	16.840.000,00	2	15.670.810,00	20,00	20,16				
1.22	Koordinasi dan Penilaian	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	4.080.804,01							2	245.000,00	0	0,00	0,00	0,00				



	Barang Milik Daerah SKPD																
1.23	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5	12.752.512,53							1	10.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.24	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	120	15.303.015,03							24	530.000,00	18	0,00	15,00	0,00	
1.25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	349.206.582,06			12	61.990.000,00	12	50.800.650,00	12	42.000.000,00	21	79.200.650,00	35,00	22,68	
1.26	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																



1.27	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90	3.436.313.015,75			90	322.002.000,00	86	276.217.000,00	90	461.937.400,00	120	513.115.185,00	133,30	14,93
1.28	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															
1.29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	714.140.701,40							0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.30	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
1.31	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	156.927.135,00			12	17.400.000,00	12	16.000.000,00	12	29.200.000,00	21	39.600.000,00	35,00	25,23



	n																
1.32	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	667.625.626,25			25	-	-	-		25	39.500.000,00	0	0,00	0,00	0,00
1.33	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	360.810.300,60			8	52.680.000,00	7	39.410.000,00		50	36.420.000,00	57	63.160.000,00	114,00	17,51
1.34	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180	1.536.809.252,50			25	251.922.000,00	25	220.807.000,00		25	356.817.400,00	45	410.355.185,00	25,00	26,70
1.35	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>90</b>	<b>13.548.876.220,86</b>			<b>90</b>	<b>1.475.053.537,00</b>	<b>68</b>	<b>1.003.872.150,00</b>		<b>90</b>	<b>2.691.105.500,00</b>	64	2.853.641.539,00	70,94	21,06
1.36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	492.236.134,90			10	33.145.684,00	13	33.073.800,00		1	42.003.199,00	15	44.306.800,00	300,00	9,00



1.37	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	1.877.797.979,53			9	560.953.695,00	7	198.078.500,00		3	426.221.886,00	14	595.395.500,00	93,33	31,71
1.38	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	293.337.850,50			35	53.389.600,00	35	35.365.500,00		2	77.588.850,00	37	105.270.710,00	370,00	35,89
1.39	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	1.084.964.444,30			4	284.329.998,00	4	224.797.550,00		4	343.148.355,00	9	361.492.550,00	45,00	33,32
1.40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	876.450.811,50			7	257.372.560,00	7	228.732.250,00		1	377.352.210,00	9	369.861.250,00	180,00	42,20
1.41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65	490.282.410,82			15.000	80.560.000,00	6.668	79.145.000,00		13	72.000.000,00	13	130.703.750,00	20,00	26,66
1.42	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	1.034.073.185,12								1	11.525.000,00	2	10.915.000,00	40,00	1,06



1.43	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1200	971.868.979,53							240	628.730.000,00	140	514.609.825,00	11,67	52,95
1.44	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2500	6.162.612.164,13		364	205.302.000,00	101	204.679.550,00		500	660.336.000,00	406	681.486.154,00	16,24	11,06
1.45	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	265.252.260,52							12	52.200.000,00	9	39.600.000,00	15,00	14,93
1.46	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi</b>	<b>90</b>	<b>2.235.840.578,03</b>		<b>90</b>	<b>251.630.189,00</b>	<b>59</b>	<b>148.052.000,00</b>		<b>90</b>	<b>160.000.000,00</b>	160	228.052.000,00	177,78	10,20
1.47	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	510.100.501,00							1	0	0	0,00	0,00	0,00
1.48	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	597.455.826,46		3	85.340.094,00	3	69.732.000,00		2	0	3	69.732.000,00	30,00	11,67



1.49	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	720.203.849,77			2	166.290.095,00	2	78.320.000,00		2	0	2	78.320.000,00	20,00	10,87
1.50	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0								1	0	0	0,00	0,00	0,00
1.51	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	10	0								2	80.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
1.52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	408.080.400,80								3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	100,00	19,60
1.53	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>90</b>	<b>13.683.070.929,33</b>			<b>90</b>	<b>2.922.913.000,00</b>	<b>81</b>	<b>2.372.588.985,00</b>		<b>90</b>	<b>3.010.450.000,00</b>	178	4.486.647.485,00	197,76	32,79
1.54	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	57 50	113.063.075,15			4,73 6	20.900.000,00	1,60 8	14.409.000,00		1,15 0	23.000.000,00	2,59 9	24.319.000,00	45,20	21,51



1.55	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	2.732.852.254,50			17	529.400.000,00	17	519.681.813,00	8	492.000.000,00	25	941.249.487,00	41,67	34,44
1.56	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	80.000.000,00					1	80.000.000,00	0	0	1	1.758.498.172,00	100,00	2198,12
1.57	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	540	10.757.155.599,68			1	2.292.613.000,00	1	1.758.498.172,00	108	2.495.450.000,00	57	1.762.580.826,00	10,56	16,39
1.58	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>90</b>	<b>5.706.968.141,50</b>			<b>90</b>	<b>1.085.292.200,00</b>	<b>86</b>	<b>930.686.175,00</b>	<b>90</b>	<b>988.534.000,00</b>	178	1.609.111.400,00	198,03	28,20
1.59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	1.615.842.888,02			7	363.070.000,00	7	300.559.300,00	7	234.990.000,00	19	518.368.841,00	54,29	32,08



	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
1.60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	1.763.367.317,11			11	264.570.000,00	12	235.558.300,00		20	231.220.000,00	22	465.979.484,00	22,00	26,43
1.61	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75	127.525.125,25								15	11.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
1.62	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	320	771.777.133,77			13	131.500.000,00	13	113.117.375,00		64	75.250.000,00	61	171.798.375,00	19,06	22,26
1.63	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	135	127.525.125,25								27	82.800.000,00	21	33.430.000,00	15,56	26,21
1.64	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	535.779.800,60			3	326.152.200,00	3	281.451.200,00		3	289.322.000,00	6	369.406.700,00	200,00	68,95



	Lainnya															
1.65	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	255.050.250,50							3	21.952.000,00	3	13.290.000,00	100,00	5,21
1.66	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1	510.100.501,00							1	42.000.000,00	0	36.838.000,00	0,00	7,22
1.67	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase layanan keuangan yang tersedia</b>	<b>90</b>	<b>107.248.059.418,63</b>			<b>90</b>	<b>16.139.525.789,00</b>	<b>93</b>	<b>15.080.415.828,00</b>	<b>90,00</b>	<b>17.522.690.000,00</b>	118	28.077.142.497,00	131,05	26,18
1.68	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	40	104.895.969.462,15			40	15.754.140.789,00	40	14.751.610.628,00	40	17.442.690.000,00	80	27.748.337.297,00	200,00	26,45
1.69	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5	1.864.009.555,68			190	305.385.000,00	-	292.613.200,00	1	0	5	292.613.200,00	100,00	15,70
1.70	Pelaksanaan Medical	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	40	488.080.400,00			40	80.000.000,00	-	36.192.000,00	40	80.000.000,00	25	36.192.000,00	62,50	7,42



	Check Up DPRD	DPRD		80			0,00		0,00			0,00		0,00		
1.71	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia</b>	<b>90</b>	<b>7.347.192.175,92</b>			<b>90</b>	<b>1.182.670.000,00</b>	<b>-</b>	<b>923.782.600,00</b>	<b>90</b>	<b>673.736.000,00</b>	104	1.152.999.600,00	116,03	15,69
1.72	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	360	1.166.089.745,29							6	33.180.000,00	1	510.000,00	0,28	0,04
1.73	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	60	6.181.102.430,64			79	1.182.670.000,00	43	923.782.600,00	12	640.556.000,00	51	1.152.489.600,00	85,00	18,65
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik</b>	<b>63</b>	<b>100.634.303.872,82</b>			<b>90</b>	<b>7.095.278.800,00</b>	<b>73</b>	<b>5.144.527.829,00</b>	<b>63</b>	<b>9.444.331.400,00</b>	95,48	10.367.737.929,00	151,55	10,30
2.1	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun</b>	<b>15</b>	<b>21.504.616.342,03</b>			<b>11</b>	<b>1.245.978.400,00</b>	<b>4</b>	<b>1.181.127.200,00</b>	<b>24</b>	<b>1.593.648.750,00</b>	31	2.013.931.790,00	206,67	9,37
2.2	Penyusunan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan	45	510.100.501,							9	78.503.00	4	56.960.00	8,89	11,17



	Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		00								0,00		0,00		
2.3	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	45	16.050.581.181,73			7	1.245.978.400,00	7	1.181.127.200,00	9	901.041.750,00	17	1.365.468.600,00	37,78	8,51
2.4	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10	255.050.250,50							2	18.125.000,00	2	5.750.000,00	20,00	2,25
2.5	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	20	4.488.884.408,80							4	595.979.000,00	4	585.753.190,00	20,00	13,05
2.6	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang tersusun	1	200.000.000,00							0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.7	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun</b>	<b>35</b>	<b>6.656.811.538,05</b>							<b>7</b>	<b>870.184.000,00</b>	<b>6</b>	<b>468.527.610,00</b>	<b>17,14</b>	<b>7,04</b>



2.8	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	1.326.261.302,60							1	239.655.000,00	1	104.979.610,00	20,00	7,92
2.9	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5	1.326.261.302,60							1	125.312.000,00	1	97.838.000,00	20,00	7,38
2.10	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5	1.326.261.302,60							1	239.655.000,00	1	75.050.000,00	20,00	5,66
2.11	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	5	1.326.261.302,60							1	141.275.000,00	1	76.175.000,00	20,00	5,74
2.12	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	10	25.505.025,05							2	4.000.000,00	1	0,00	10,00	0,00
2.13	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	5	1.326.261.302,60							1	120.287.000,00	1	114.485.000,00	20,00	8,63
2.14	<b>Pengawasan Penyelenggaraan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang</b>	<b>1540</b>	<b>3.688.177.611,98</b>							<b>272</b>	<b>479.556.500,00</b>	130	173.627.000,00	8,44	4,71



	<b>Pemerintah an</b>	<b>tersusun</b>															
2.15	Pengawasan Urusan Pemerintah an bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36 0	464.347.546, 66							60	61.155.00 0,00	35	19.170.00 0,00	9,72	4,13	
2.16	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Infrastrukt ur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30 0	519.516.956, 25							60	61.155.00 0,00	46	27.725.00 0,00	15,33	5,34	
2.17	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahtera an Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36 0	464.347.546, 66							60	61.155.00 0,00	19	11.475.00 0,00	5,28	2,47	
2.18	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Perekonomi an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36 0	464.347.546, 66							60	61.155.00 0,00	27	11.200.00 0,00	7,50	2,41	
2.19	Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Sumber	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	14 0	382.575.375, 75							28	17.030.00 0,00	0	0,00	0,00	0,00	



	Daya Alam																
2.20	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 21 oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5	464.347.546,66							1	0	1	0,00	20,00	0,00	
2.21	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10	464.347.546,66							2	111.632.000,00	1	0,00	10,00	0,00	
2.22	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5	464.347.546,66							1	106.274.500,00	1	104.057.000,00	20,00	22,41	
2.23	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Jumlah Dokumen Peningkatan kapasitas DPRD</b>	<b>30</b>	<b>20.047.024.557,66</b>			<b>90</b>	<b>1.633.836.200,00</b>	<b>-</b>	<b>916.636.000,00</b>	<b>6</b>	<b>2.242.968.800,00</b>	11	2.400.184.200,00	36,67	11,97	
2.24	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	40	500.000.000,00							0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.25	Pendalaman Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas	30	15.414.427.904,20							6	1.684.438.800,00	11	1.965.583.200,00	36,67	12,75	



	DPRD	DPRD															
2.26	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	294.999.760,52			24	17.400.000,00	-	13.046.000,00		12	69.210.000,00	33	38.046.000,00	55,00	12,90
2.27	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	612.120.601,20								0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.28	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	1.836.361.803,60								6	252.000.000,00	6	189.000.000,00	100,00	10,29
2.29	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120	1.343.205.443,05			28	101.725.000,00	14	101.705.000,00		28	232.910.000,00	32	207.555.000,00	26,67	15,45
2.30	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	5	45.909.045,09								1	4.410.000,00	0	0,00	0,00	0,00
2.31	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun</b>	<b>140</b>	<b>19.703.861.666,68</b>			<b>310</b>	<b>2.021.921.000,00</b>	<b>88</b>	<b>1.446.456.500,00</b>		<b>25</b>	<b>1.446.138.000,00</b>	<b>262</b>	<b>2.346.153.500,00</b>	<b>187,14</b>	<b>11,91</b>



2.32	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	120	3.010.991.908,15			190	460.333.000,00	161	185.934.000,00		24	107.665.000,00	178	222.997.000,00	148,33	7,41
2.33	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	5	178.535.175,35								1	4.800.000,00	1	4.800.000,00	20,00	2,69
2.34	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	16.514.334,583,18			120	1.561.588.000,00	80	1.260.522.500,00		3	1.333.673.000,00	82	2.118.356.500,00	546,67	12,83
2.35	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun</b>	<b>6</b>	<b>594.730.815,89</b>								<b>1,00</b>	<b>59.009.350,00</b>	1	26.965.000,00	16,67	4,53
2.36	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	95.000.000,00								0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.37	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	499.730.815,89								1	59.009.350,00	1	26.965.000,00	20,00	5,40
2.38	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun</b>	<b>165</b>	<b>4.764.945.922,86</b>			<b>15</b>	<b>859.810.000,00</b>	<b>15</b>	<b>675.677.000,00</b>		<b>30</b>	<b>784.000.000,00</b>	45	1.131.677.000,00	27,27	23,75



2.39	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	165	4.764.945.922,86			15	859.810.000,00	15	675.677.000,00		30	784.000.000,00	45	1.131.677.000,00	27,27	23,75
2.40	<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>Jumlah Fasilitas DPRD yang terlaksana</b>	<b>205</b>	<b>23.674.135.417,67</b>			119	<b>1.333.733.200,00</b>	<b>32</b>	<b>924.631.129,00</b>		<b>41</b>	<b>1.968.826.000,00</b>	84	1.806.671.829,00	40,98	7,63
2.41	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80	21.712.058.325,40			120	1.333.733.200,00	50	924.631.129,00		16	1.285.416.000,00	74	1.531.352.829,00	92,50	7,05
2.42	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	5	127.525.125,25								1	9.250.000,00	0	0,00	0,00	0,00
2.43	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	1.103.455.524,97								12	137.124.000,00	1	6.950.000,00	1,67	0,63
2.44	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	60	731.096.442,05								12	537.036.000,00	9	268.369.000,00	15,00	36,71



2.45	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	0	0							0	0	0	0,00	0,00	0,00
------	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	------	------	------



## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan Fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat diform sebagai berikut (T-C 30):



Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD  
Kabupaten Pangandaran

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	-	%	n/a	68.25	69.50	72.50	67.00	61.60	69.50	72.50	-
2	Indeks Pelayanan Publik	-	%	n/a	2.61-2.65	2.66-2.75	2.86-2.95	3.33	TW IV	3.45	3.55	-



### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik;
2. Reformasi birokrasi secara terus menerus membuka peluang bagi peningkatan profesionalisme aparat serta nilai-nilai demokratis, partisipatif, transparansi dan akuntabel. Terbukanya peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan sejenisnya;
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menciptakan percepatan arus informasi yang tak terbatas ruang dan waktu. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk menggunakan semua kebutuhan informasi yang di kehendaki. Akses program dan kegiatan di OPD bisa di ketahui oleh masyarakat, hal ini menunjukkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2022, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan karena adanya beberapa perubahan mengenai Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini (TC-31) :



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lo- kasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lo- kasi	Indikator Kinerja	Targ et Cap aian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>											
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>											
					<b>46,274,534,028</b>					<b>41,915,874,681</b>	
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>KAB. PANGANDARAN</b>	<b>Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas</b>	<b>90 %</b>	<b>29,320,534,778</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>KAB. PANGANDARAN</b>	<b>Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas</b>	<b>90 %</b>	<b>29,498,373,611</b>	
1.1	<b>Perencanaan, Peng anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran			73,225,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu. 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	90 %	68,635,900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	8 Doku men	56,863,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	8 Dok ume n	55,852,880	



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	1,010,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	1,132,700	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,010,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,121,500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,444,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,010,880	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,444,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,505,980	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,444,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,505,980	



	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,010,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,505,980	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran			4,494,655,503	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Persentase unit kerjayang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90 %	5,064,995,044	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	25 Orang /Bulan	4,268,806,373	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	25 Orang /Bulan	4,966,012,324	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"	2 Dokumen	68,339,630	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD"	2 Dokumen	93,984,240	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	154,681,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,467,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	505,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pangandara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	420,000	



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Dokumen	1,515,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Dokumen	1,429,800	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	1 Dokumen	808,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	1 Dokumen	681,680	
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran			79,476,900	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	90 %	68,929,860	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"	1 Dokumen	858,500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"	1 Dokumen	850,940	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	2 Dokumen	15,392,400	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	2 Dokumen	17,494,500	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD"	2 Laporan	808,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD"	2 Laporan	636,820	



	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD"	1 Laporan	2,525,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD"	1 Laporan	1,190,480	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Dokumen	3,030,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Dokumen	2,315,680	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	2 Laporan	56,863,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	2 Laporan	46,441,440	
1.5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran			608,020,000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90 %	450,079,005	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	1 Paket	141,400,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	1 Paket	80,405,325	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	27,270,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	18,070,480	



	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	126,250,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	42,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	50 Orang	60,600,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	50 Orang	57,509,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	252,500,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	252,094,200	
1.6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran			1,885,613,163	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90 %	1,961,600,433	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	2 Paket	90,900,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	2 Paket	84,793,010	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	3 Paket	310,862,875	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	3 Paket	304,890,303	



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	2 Paket	50,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	2 Paket	50,142,210	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	5 Paket	177,960,735	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	5 Paket	177,646,842	
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang Disediakan"	2 Paket	151,500,000	Penyediaan Barang Cetakandan dan Penggandaan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang Disediakan"	2 Paket	139,527,468	
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5496 Dokumen	82,820,000	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5496 Dokumen	73,336,000	
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	204,746,695						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	192,430,250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	240 Laporan	507,220,000	



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	1182 Laporan	571,372,608	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	1182 Laporan	571,844,600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	12 Dokumen	52,520,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	12 Dokumen	52,200,000	
1.7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Pangandaran			399,933,942	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90 %	399,021,400	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"	2 unit	101,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"	2 unit	112,200,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	98,906,718	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	84,020,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Unit Peralatandan Mesin Lainnya yang Disediakan"	1 unit	119,227,224	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	1 unit	122,801,400	



	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	3 unit	80,800,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	3 unit	80,000,000	
1.8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pangandaran			1,864,650,890	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90 %	3,140,900,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	5 Laporan	15,150,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	5 Laporan	16,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	454,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	579,600,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1,395,000,890	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	2,545,300,000	
1.9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pangandaran			944,178,300	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	90 %	1,114,255,759	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	7 unit	249,581,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	234,990,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	304,232,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	312,160,000	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	25,250,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pangandaran	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	18,750,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	18 Jenis	127,765,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	18 Jenis	114,750,000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	25,250,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Pangandaran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 unit	79,200,000	



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	3 unit	60,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	3 unit	289,322,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	3 unit	50,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	3 unit	65,083,759	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Pangandaran	"Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi"	1 Ha	101,000,000		Kab. Pangandaran				
1.15	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Kab. Pangandaran			17,799,317,430	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Kab. Pangandaran	Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia	80 %	16,693,682,350	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD"	40 Orang/Bulan	17,409,937,180	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD"	40 Orang/Bulan	16,301,127,200	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan"	2 Paket	308,580,250	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan"	2 Paket	312,555,150	



	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD"	40 Orang	80,800,000	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD"	40 Orang	80,000,000	
1.16	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Kab. Pangandaran			1,171,463,650	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Kab. Pangandaran	Persentase layanan keuangan yang tersedia	90 %	536,273,860	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	72 Laporan	230,886,000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	72 Laporan	65,160,000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi danKonsultasi DPRD"	12 Laporan	940,577,650	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD"	12 Laporan	471,113,860	
2	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Kab. Pangandaran</b>	<b>Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana dengan baik</b>	<b>63 %</b>	<b>16,953,999,250</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Kab. Pangandaran</b>	<b>Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik</b>	<b>63 %</b>	<b>12,417,501,070</b>	
2.1	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Kab. Pangandaran			2,792,925,195	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	15 Peraturan	1,267,364,550	



	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"	15 Dokumen	101,000,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"	15 Dokumen	96,551,750	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	15 Dokumen	1,752,625,195	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	15 Dokumen	451,233,150	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	50,500,000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	12,737,400	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi"	6 Dokumen	888,800,000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi"	6 Dokumen	706,842,250	
2.2	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Kab. Pangandaran			1,318,050,000	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	7 Dokumen	1,196,350,800	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS"	1 Dokumen	262,600,000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA danPPAS"	1 Dokumen	262,417,050	



	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"	1 Dokumen	262,600,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"	1 Dokumen	262,417,200
	Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	262,600,000	Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	262,463,850
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan"	1 Dokumen	262,600,000	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan"	1 Dokumen	141,275,500
	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	5,050,000	Pembahasan Laporan Semester	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	5,080,000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD"	1 Dokumen	262,600,000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD"	1 Dokumen	262,697,200
2.3	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Kab. Pangandaran			730,259,896	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	308 Dokumen	757,633,900



Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	91,940,906	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	83,415,000	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur"	60 Laporan	102,864,460	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur"	60 Laporan	83,415,000	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	72 Laporan	91,940,906	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	72 Laporan	83,415,000	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian"	72 Laporan	91,940,906	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian"	72 Laporan	83,415,000	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam"	28 Laporan	75,750,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam"	28 Laporan	69,415,000	
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"	1 Laporan	91,940,906	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"	1 Laporan	114,915,000	



	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran"	2 Laporan	91,940,906	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran"	2 Laporan	91,744,900	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	91,940,906	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Laporan	147,899,000	
2.4	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Kab. Pangandaran			3,095,652,020	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	Kab. Pangandaran	persentase peningkatan kapasitas DPRD	13 %	3,058,470,000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD"	4 Dokumen	2,303,484,780	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD"	4 Dokumen	2,447,234,000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan"	12 Dokumen	52,520,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan"	12 Dokumen	69,250,000	
	Penyediaan Kelompok Pakardan Tim Ahli	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli"	60 Orang	121,200,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pangandaran	"Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli"	60 Orang	60,000,000	



	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	363,600,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	360,000,000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat"	28 Dokumen	245,757,240	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat"	28 Dokumen	112,879,200	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	120 Dokumen	9,090,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	120 Dokumen	9,106,800	
2.5	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Kab. Pangandaran			3,064,004,680	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	150 Dokumen	2,846,834,100	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	294,764,460	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	179,769,000	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun"	1 Dokumen	35,350,000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun"	1 Dokumen	9,906,400	



	Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 Dokumen	2,733,890,220	Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 Dokumen	2,657,158,700	
2.6	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Kab. Pangandaran			193,764,460	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	3 Dokumen	67,340,000	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD"	4 Laporan	193,764,460	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD"	4 Laporan	67,340,000	
2.7	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	Kab. Pangandaran			788,820,100	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah	18 Media Elektronik 18 Media Online	639,000,000	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun"	30 Dokumen	788,820,100	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun"	30 Dokumen	639,000,000	



2.8	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Kab. Pangandaran			4,970,522,899	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Kab. Pangandaran	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	78 Dokumen	2,584,507,720	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD"	48 Dokumen	2,829,406,052	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD"	48 Dokumen	1,779,058,000	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun"	1 Laporan	25,250,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun"	1 Laporan	25,358,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah"	12 Dokumen	218,484,412	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah"	12 Dokumen	243,021,720	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD"	12 Dokumen	144,757,240	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pangandaran	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD"	12 Dokumen	537,070,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	10 Dokumen	1,752,625,195						



## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada table T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C. 32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cat
<b>NIHIL</b>					



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari segi sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk, keragaman budaya dan sumber daya manusia. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang memiliki Visi “Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa”, yang diimplementasikan melalui 6 prioritas misi, yakni:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai unsur fasilitasi atau pelayanan kepada DPRD. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 5 yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang



melayani, efektif, efisien dan akuntabel”. Maka dari itu Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Meningkatkan kualitas pelayanan public yang cepat dan responsive”. Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan/fasilitas terhadap kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dalam mengakomodir kepentingan masyarakat.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD**

Mengacu kepada Visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap Misi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu, “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dan meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran”

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2023 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran yang ingin diwujudkan pada 2016–2021 yaitu mewujudkan “Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia “.

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2023 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 program, 18 kegiatan dan 84 Sub kegiatan, sebagai berikut :



Tabel T-C.33  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KABUPATEN PANGANDARAN

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4									
4	02								
4	02	01							
4	02	01	2.01						
4	02	01	2.01	01					
4	02	01	2.01	02					



4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	1,121,500	PAD		1 Dokumen	1,020,100
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	3,010,880	PAD		1 Dokumen	4,488,440
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	2,505,980	PAD		1 Dokumen	4,488,440
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	2,505,980	PAD		1 Laporan	4,488,440
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran	1 Laporan	2,505,980	PAD		1 Laporan	1,020,100
4	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase unit kerjayang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Kab. Pangandaran	90 %	5,064,995,044	PAD		90 %	5,160,809,294



4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	Kab. Pangandaran	25 Orang/Bulan	4,966,012,324	PAD		25 Orang/Bulan	4,311,494,436
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD"	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	93,984,240	PAD		2 Dokumen	690,230,263
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran	1 Laporan	2,467,000	PAD		1 Laporan	156,228,315
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	420,000	PAD		1 Dokumen	510,050
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	1,429,800	PAD		2 Dokumen	1,530,150
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	"Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	681,680	PAD		1 Dokumen	816,080
4	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Kab. Pangandaran	90 %	68,929,860	PAD		90 %	80,271,669



4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	850,940	PAD		1 Dokumen	867,085
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	17,494,500	PAD		2 Dokumen	15,546,324
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	"Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD"	Kab. Pangandaran	2 Laporan	636,820	PAD		2 Laporan	816,080
4	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD"	Kab. Pangandaran	1 Laporan	1,190,480	PAD		1 Laporan	2,550,250
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran	28 Dokumen	2,315,680	PAD		28 Dokumen	3,060,300
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Kab. Pangandaran	2 Laporan	46,441,440	PAD		2 Laporan	57,431,630
4	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran	90 %	450,079,005	PAD		90 %	614,100,200
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	Kab. Pangandaran	1 Paket	80,405,325	PAD		1 Paket	142,814,000



4	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	18,070,480	PAD		12 Dokumen	27,542,700
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pangandaran	25 Orang	42,000,000	PAD		25 Orang	127,512,500
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	Kab. Pangandaran	50 Orang	57,509,000	PAD		50 Orang	61,206,000
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	25 Orang	252,094,200	PAD		25 Orang	255,025,000
4	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Kab. Pangandaran	90 %	1,961,600,433	PAD		90 %	1,904,469,296
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	Kab. Pangandaran	2 Paket	84,793,010	PAD		2 Paket	91,809,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Kab. Pangandaran	3 Paket	304,890,303	PAD		3 Paket	313,971,504
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	Kab. Pangandaran	2 Paket	50,142,210	PAD		2 Paket	51,005,000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	Kab. Pangandaran	5 Paket	177,646,842	PAD		5 Paket	179,740,343



4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan"	Kab. Pangan-daran	2 Paket	139,527,468	PAD		2 Paket	153,015,000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pangan-daran	5496 Dokumen	73,336,000	PAD		5496 Dokumen	83,648,200
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	Kab. Pangan-daran	240 Laporan	507,220,000	PAD		240 Laporan	194,354,553
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Kab. Pangan-daran	1182 Laporan	571,844,600	PAD		1182 Laporan	577,086,334
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	Kab. Pangan-daran	12 Dokumen	52,200,000	PAD		12 Dokumen	53,045,200
4	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	Kab. Pangan-daran	90 %	399,021,400	PAD		90 %	403,933,282
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"	Kab. Pangan-daran	2 unit	112,200,000	PAD		2 unit	102,010,000
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pangan-daran	3 unit	84,020,000	PAD		3 unit	99,895,786
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	Kab. Pangan-daran	1 unit	122,801,400	PAD		1 unit	120,419,496



4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Unit Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	Kab. Pangan-daran	3 unit	80,000,000	PAD		3 unit	81,608,000
4	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Kab. Pangan-daran	90 %	3,140,900,000	PAD		90 %	1,883,297,399
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Pangan-daran	5 Laporan	16,000,000	PAD		5 Laporan	15,301,500
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangan-daran	15 Laporan	579,600,000	PAD		15 Laporan	459,045,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangan-daran	12 Laporan	2,545,300,000	PAD		12 Laporan	1,408,950,899
4	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase unit barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Pangan-daran	90 %	1,114,255,759	PAD		90 %	953,620,083
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pangan-daran	7 unit	234,990,000	PAD		7 unit	252,076,911
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangan-daran	15 unit	312,160,000	PAD		15 unit	307,274,522



4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	3 unit	18,750,000	PAD		3 unit	25,502,500
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Kab. Pangandaran	18 Jenis	114,750,000	PAD		18 Jenis	129,042,650
4	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Pangandaran	2 unit	79,200,000	PAD		2 unit	25,502,500
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Kab. Pangandaran	3 unit	289,322,000	PAD		3 unit	61,206,000
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Kab. Pangandaran	3 unit	65,083,759	PAD		3 unit	51,005,000
4	02	01	2.15		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia	Kab. Pangandaran	80 %	16,693,682,350	PAD		80 %	17,977,310,604
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	"Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD"	Kab. Pangandaran	40 Orang/ Bulan	16,301,127,200	PAD		40 Orang/ Bulan	17,584,036,551
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	"Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan"	Kab. Pangandaran	2 Paket	312,555,150	PAD		2 Paket	311,666,053
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	"Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD"	Kab. Pangandaran	40 Orang	80,000,000	PAD		40 Orang	81,608,000
4	02	01	2.16		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase layanan keuangan yang tersedia	Kab. Pangandaran	90 %	536,273,860	PAD		90 %	1,183,178,287
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pangandaran	72 Laporan	65,160,000	PAD		72 Laporan	233,194,860



4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	"Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD"	Kab. Pangandaran	12 Laporan	471,113,860	PAD		12 Laporan	949,983,427
4	02	02			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik</b>	Kab. Pangandaran	<b>63 %</b>	<b>12,417,501,070</b>	PAD		63 %	17,834,328,993
4	02	02	2.01		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Pangandaran	15 Peraturan	1,267,364,550	PAD		15 Peraturan	3,644,170,449
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"	Kab. Pangandaran	15 Dokumen	96,551,750	PAD		15 Dokumen	102,010,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	Kab. Pangandaran	15 Dokumen	451,233,150	PAD		15 Dokumen	2,593,467,449
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pangandaran	15 Dokumen	12,737,400	PAD		15 Dokumen	51,005,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi"	Kab. Pangandaran	6 Dokumen	706,842,250	PAD		6 Dokumen	897,688,000
4	02	02	2.02		<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	Kab. Pangandaran	7 Dokumen	1,196,350,800	PAD		7 Dokumen	1,331,230,500
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS"	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	262,417,050	PAD		1 Dokumen	265,226,000



4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	262,417,200	PAD		1 Dokumen	265,226,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	262,463,850	PAD		1 Dokumen	265,226,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan"	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	141,275,500	PAD		1 Dokumen	265,226,000
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kab. Pangandaran	2 Dokumen	5,080,000	PAD		2 Dokumen	5,100,500
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD"	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	262,697,200	PAD		1 Dokumen	265,226,000
4	02	02	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Kab. Pangandaran	308 Dokumen	757,633,900	PAD		308 Dokumen	737,562,495
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pangandaran	72 Laporan	83,415,000	PAD		72 Laporan	92,860,315
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur"	Kab. Pangandaran	60 Laporan	83,415,000	PAD		60 Laporan	103,893,105
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pangandaran	72 Laporan	83,415,000	PAD		72 Laporan	92,860,315



4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian"	Kab. Pangandaran	72 Laporan	83,415,000	PAD		72 Laporan	92,860,315
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam"	Kab. Pangandaran	28 Laporan	69,415,000	PAD		28 Laporan	76,507,500
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"	Kab. Pangandaran	1 Laporan	114,915,000	PAD		1 Laporan	92,860,315
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran"	Kab. Pangandaran	2 Laporan	91,744,900	PAD		2 Laporan	92,860,315
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pangandaran	1 Laporan	147,899,000	PAD		1 Laporan	92,860,315
4	02	02	2.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	persentase peningkatan kapasitas DPRD	Kab. Pangandaran	13 %	3,058,470,000	PAD		13 %	3,126,608,540
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD"	Kab. Pangandaran	4 Dokumen	2,447,234,000	PAD		4 Dokumen	2,326,519,628
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	"Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan"	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	69,250,000	PAD		12 Dokumen	53,045,200
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	"Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli"	Kab. Pangandaran	60 Orang	60,000,000	PAD		60 Orang	122,412,000



4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pangandaran	6 Orang	360,000,000	PAD		6 Orang	367,236,000
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat"	Kab. Pangandaran	28 Dokumen	112,879,200	PAD		28 Dokumen	248,214,812
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	120 Dokumen	9,106,800	PAD		120 Dokumen	9,180,900
4	02	02	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	Kab. Pangandaran	150 Dokumen	2,846,834,100	PAD		150 Dokumen	3,094,644,727
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Pangandaran	24 Laporan	179,769,000	PAD		24 Laporan	297,712,105
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	"Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun"	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	9,906,400	PAD		1 Dokumen	35,703,500
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Pangandaran	120 Dokumen	2,657,158,700	PAD		120 Dokumen	2,761,229,122
4	02	02	2.06		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	Kab. Pangandaran	3 Dokumen	67,340,000	PAD		3 Dokumen	100,702,105
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD"	Kab. Pangandaran	4 Laporan	67,340,000	PAD		4 Laporan	100,702,105
4	02	02	2.07		<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah	Kab. Pangandaran	18 Media Elekonik 18 Media Online	639,000,000	PAD		18 MediaElekt onik 18 MediaOnli ne	796,708,301



4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	"Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun"	Kab. Pangandaran	30 Dokumen	639,000,000	PAD		30 Dokumen	796,708,301
4	02	02	2.08		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	Kab. Pangandaran	78 Dokumen	2,584,507,720	PAD		78 Dokumen	5,002,701,876
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD"	Kab. Pangandaran	48 Dokumen	1,779,058,000	PAD		48 Dokumen	2,857,700,113
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	"Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun"	Kab. Pangandaran	1 Laporan	25,358,000	PAD		1 Laporan	25,502,500
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah"	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	243,021,720	PAD		12 Dokumen	220,669,256
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD"	Kab. Pangandaran	12 Dokumen	537,070,000	PAD		12 Dokumen	146,204,812



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program/kegiatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran terdiri dari 2 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 10 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 8 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.

Berikut secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2023:



Tabel 4.1  
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023  
SEKRETARIAT DPRD

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rekening	Anggaran	Indikator Kinerja				Target Capaian Kinerja	
			Indikator	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>41,915,874,681</b>						
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>29,498,373,611</b>	<b>Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas</b>				Nilai SAKIP 69.25	<b>90 %</b>
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	68,635,900	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu</b>				<b>12 Dokumen</b>	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55,852,880	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Renja 2024, Renja Perubahan Tahun 2023 dan Review Renstra	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>3 Dokumen</b>
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,132,700	<b>Jumlah Dokumen RKA-SKPD</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>1 Dokumen</b>
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,121,500	<b>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>1 Dokumen</b>
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,010,880	<b>Jumlah Dokumen DPA-SKPD</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Dokumen
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,505,980	<b>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Dokumen



1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,505,980	<b>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen capaian kinerja Triwulan IV 2022, Triwulan I, II, III 2023	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>4 Laporan</b>	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,505,980	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>1 Laporan</b>	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5,064,995,044	<b>Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun</b>						<b>40 Dokumen</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,966,012,324	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	Hasil Penilaian SAKIP	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	25 Orang/ Bulan	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	93,984,240	<b>"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD"</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen administrasi penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	12 Dokumen	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,467,000	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Laporan	
2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	420,000	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Dokumen	
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,429,800	<b>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Keuangan Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	13 Dokumen	
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	681,680	"Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran"	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Dokumen	
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	68,929,860	<b>Dokumen barang milik daerah yang tersedia dalam kondisi baik</b>						<b>46 Dokumen</b>



3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	850,940	"Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD"	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Dokumen	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17,494,500	"Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD"	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen Asuransi Mobil dan Dokumen Asuransi motor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	2 Dokumen	
3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	636,820	<b>"Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah"</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan hasil penilaian barang milik daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	2 Laporan	
3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1,190,480	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD"	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Laporan	
3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,315,680	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Rekonsiliasi Aset dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	28 Dokumen	
3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	46,441,440	"Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD"	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>12 Laporan</b>	
4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	450,079,005	<b>Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersusun</b>						113 Dokumen
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80,405,325	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	Hasil Penilaian SAKIP	Jenis Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 Paket	
4.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18,070,480	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen sistem informasi kepegawaian/bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	12 Dokumen	



4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42,000,000	<b>Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	25 Orang	
4.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	57,509,000	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	50 Orang	
4.5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	252,094,200	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	25 Orang	
5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1,961,600,433	<b>Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik</b>						<b>356 Dokumen</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	84,793,010	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>1 Paket</b>	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	304,890,303	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Paket alat tulis kantor Paket penyelenggaraan acara Paket perlengkapan kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	3 Paket	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,142,210	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Peralatan Perabot kantor Paket Peralatan untuk kegiatan kantor lainnya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	2 Paket	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	177,646,842	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Paket bahan kimia Paket bahan isi tabung gas Paket bahan lainnya Paket souvenir/cinderamata	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>4 Paket</b>	
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	139,527,468	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Paket bahan cetak penggandaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>1 Paket</b>	



5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	73,336,000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen MOU penyediaan bahan bacaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>13 Dokumen</b>	
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	507,220,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	240 Laporan	
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	571,844,600	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	80 Laporan	
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52,200,000	"Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD"	Hasil Penilaian SAKIP	Dokumen penatausahaan Arsip	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	12 Dokumen	
6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	399,021,400	<b>Unit Barang Milik daerah yang tersedia</b>						31 Unit
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112,200,000	"Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit kendaraan dinas operasional	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	2 unit	
6.2	Pengadaan Mebel	84,020,000	<b>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</b>	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit mebel yang tersedia	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>2 unit</b>	
6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122,801,400	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit peralatan dan mesin yang tersedia	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>26 unit</b>	
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80,000,000	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Pengadaan unit sarana dan prasarana pendukung	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1 unit	



7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3,140,900,000	<b>Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tersedia</b>						<b>1270 Laporan</b>
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,000,000	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penyediaan jasa surat menyurat: Materai Paket pengiriman	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	1000 Laporan 150 Laporan	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579,600,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>12 Laporan</b>	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,545,300,000	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor: Laporan rapat DPRD/Sekretariat DPRD Laporan jasa tenaga pelayanan umum kantor Laporan jasa tenaga kebersihan Laporan jasa tenaga Keamanan Laporan jasa tenaga supir	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	48 Laporan 24 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1,114,255,759	<b>Unit barang milik daerah yang terpelihara</b>						<b>139 unit</b>
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234,990,000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Hasil Penilaian SAKIP	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	7 unit	



8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312,160,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hasil Penilaian SAKIP	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>20 unit</b>
8.3	Pemeliharaan Mebel	18,750,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Mebel yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>15 unit</b>
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,750,000	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Hasil Penilaian SAKIP	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>64 unit</b>
8.5	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	79,200,000	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Hasil Penilaian SAKIP	Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>27 unit</b>
8.6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289,322,000	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Hasil Penilaian SAKIP	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	3 unit
8.7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65,083,759	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Hasil Penilaian SAKIP	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi"	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	3 unit
9.	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	16,693,682,350	<b>Orang Yang Menerima Layanan Keuangan Yang Tersedia</b>					120 orang
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16,301,127,200	"Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD"	Hasil Penilaian SAKIP	Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	40 Orang/ Bulan
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	312,555,150	"Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan"	Hasil Penilaian SAKIP	Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	<b>1 Paket</b>



9.3	Pelaksanaan Medical CheckUp DPRD	80,000,000	"Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD"	Hasil Penilaian SAKIP	Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	40 Orang	
10.	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	536,273,860	<b>Laporan Layanan Administrasi Yang Tersedia</b>						<b>84 Laporan</b>
10.1	Fasilitasi Fraksi DPRD	65,160,000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD (6 fraksi x 12 bulan)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	72 Laporan	
10.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	471,113,860	"Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD"	Hasil Penilaian SAKIP	Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Rapat paripurna hari jadi, 16 agustus, 3 kali rapat pembukaan masa sidang, 3 kali rapat tutup masa sidang, 1 rapat PAW, dan 3 kali rapat paripurna reses)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP 69.25	12 Laporan	
II.	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>12,417,501,070</b>	<b>Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik</b>					<b>Nilai Indeks Pelayanan Publik 2.66 – 2.75</b>	<b>63 %</b>
1.	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	1,267,364,550	<b>Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Yang Disepakati Bersama</b>					<b>Nilai IPP 2.66 – 2.75</b>	<b>24 Dokumen</b>
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	96,551,750	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>9 Dokumen</b>	
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	451,233,150	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah"	Hasil Penilaian Indeks	Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>9 Dokumen</b>	



				Pelayanan Publik		DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD		
1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	12,737,400	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>2 Dokumen</b>
1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	706,842,250	"Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>4 Dokumen</b>
2.	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	1,196,350,800	<b>Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran Yang Tersusun</b>				Nilai IPP 2.66 -2.75	7 Dokumen
2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	262,417,050	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Nota Kesepakatan KUA dan PPAS)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Dokumen
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	262,417,200	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Nota kesepakatan KUPA PPAS Perubahan)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Dokumen
2.3	Pembahasan APBD	262,463,850	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Raperda APBD)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Dokumen
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	141,275,500	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Raperda APBD Perubahan)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Dokumen



2.5	Pembahasan Laporan Semester	5,080,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	2 Dokumen
2.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	262,697,200	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Raperda Pertanggungjawaban APBD)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Dokumen
3.	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	757,633,900	<b>Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tersusun</b>				Nilai IPP 2.66 -2.75	308 Dokumen
3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	83,415,000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Rakor Komisi 1)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	72 Laporan
3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	83,415,000	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Rakor Komisi 3)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	60 Laporan
3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	83,415,000	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rakor komisi 4)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	72 Laporan
3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	83,415,000	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Rakor komisi 2)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	72 Laporan
3.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	69,415,000	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Rakor komisi 3)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	28 Laporan



3.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	114,915,000	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Laporan
3.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	91,744,900	"Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	2 Laporan
3.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	147,899,000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Laporan
4.	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	3,058,470,000	<b>Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD</b>				Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>63 Dokumen</b>
4.1	Pendalaman Tugas DPRD	2,447,234,000	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	4 Dokumen
4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	69,250,000	"Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	12 Dokumen
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60,000,000	"Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>12 Orang</b>



4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360,000,000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Tenaga Ahli Fraksi	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	6 Orang
4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	112,879,200	"Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	28 Dokumen
4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	9,106,800	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Dokumen
5.	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	2,846,834,100	<b>Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Tersusun</b>				Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>28 Dokumen</b>
5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	179,769,000	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	24 Laporan
5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9,906,400	"Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Dokumen
5.3	Pelaksanaan Reses	2,657,158,700	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>3 Dokumen</b>
6.	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	67,340,000	<b>Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Yang Tersusun</b>				Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>1 Dokumen</b>



6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	67,340,000	"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>1 Laporan</b>
7.	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	639,000,000	<b>Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Tersusun</b>				Nilai IPP 2.66 -2.75	33 Dokumen
7.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	639,000,000	"Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen MOU Komunikasi dan Publikasi dengan media elektronik dan media cetak	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>33 Dokumen</b>
8.	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	2,584,507,720	<b>Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana</b>				Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>53 Dokumen</b>
8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1,779,058,000	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>16 Dokumen</b>
8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	25,358,000	"Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	1 Laporan
8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	243,021,720	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Hasil Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Koordinasi Badan Musyawarah)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	12 Dokumen
8.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	537,070,000	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD"	Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Rapat Koordinasi Tugas Pimpinan DPRD)	Dukungan ketercapaian indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Nilai IPP 2.66 -2.75	<b>24 Dokumen</b>



## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dana anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Parigi, 29 Juli 2022  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN

**Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19631222 198608 1 001